

BAB III

PERMASALAHAN PERUSAHAAN

3.1 Analisa Permasalahan Yang dihadapi Perusahaan

3.1.1 Temuan Masalah

Selama melaksanakan kerja praktek penulis mengamati ada beberapa kendala di tempat pelaksanaan kerja praktek di Bagian Hukum Setda Kota Bandar Lampung berdasarkan hasil observasi dan wawancara selama pelaksanaan ditemukan beberapa masalah yang mempengaruhi kinerja dalam penyusunan dan pengkajian produk hukum, antara lain: keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang hukum, kurangnya koordinasi dengan perangkat daerah pengusul regulasi, minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses dokumentasi dan evaluasi, serta kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas produk hukum, dan perubahan yang cepat di tingkat pusat. sehingga mempengaruhi hubungan antar instansi pemerintah satu dengan lainnya karena dianggap tidak tangkap dan cermat hal ini juga berpengaruh terhadap hasil kerja yang dilakukan.

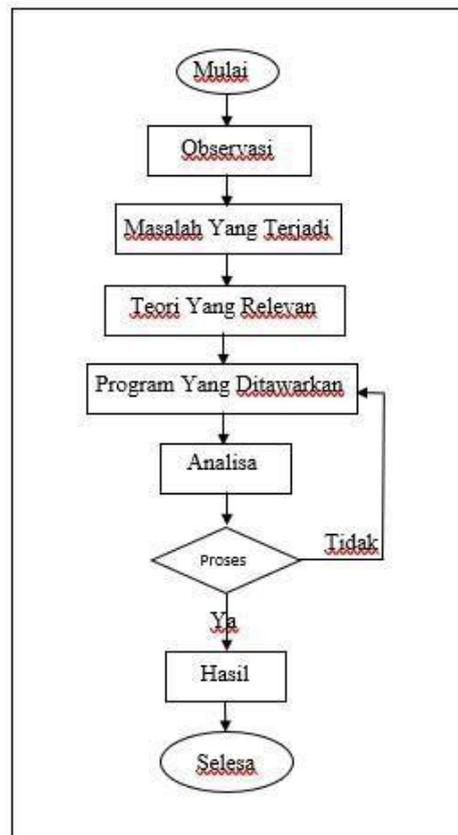
3.1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan temuan masalah yang terjadi pada instansi penulis mendapatkan gambaran untuk permasalahan pada penulisan ini, Bagaimanakah kinerja Bagian Hukum Setda Kota Bandar Lampung dalam proses penyusunan apakah dan pengkajian produk hukum pada tahun 2024? Apa saja kendala yang dihadapi oleh Bagian Hukum Setda Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan penyusunan dan pengkajian produk hukum pada tahun 2024?

Sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Bagian Hukum dalam mendukung terciptanya produk hukum yang berkualitas di Kota Bandar Lampung tahun 2024? Upaya apa saja yang telah dan dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja Bagian Hukum Setda Kota Bandar Lampung dalam penyusunan dan pengkajian produk hukum kedepan?

3.1.3 Kerangka Pemecahan Masalah

Dalam sebuah karya ilmiah, kerangka pemecahan masalah diperlukan sebagai landasan atau alur agar proses penelitian dapat berjalan dengan maksimal sehingga tidak keluar dari jalur permasalahan yang terjadi. Berikut adalah kerangka pemecahan masalah pada penelitian ini:



Gambar 3.1.3 Kerangka Pemecahan Masalah.

3.2 Landasan Teori

3.2.1 Pengertian Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan proses penilaian secara sistematis terhadap kontribusi pegawai atau unit kerja dalam mencapai tujuan organisasi, ini dikemukakan oleh Rivai (2021). Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas serta memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja ke depan. Adapun indikator kinerja mencakup : produktivitas kerja, kualitas hasil kerja, ketepatan waktu, tanggung jawab dan kepatuhan terhadap prosedur.

3.2.2 Pengertian Bagian Hukum

Bagian hukum adalah salah satu unsur pelaksana pada Sekretariat Daerah yang memiliki tugas utama dalam bidang perancangan, penyusunan, pengkajian, dan dokumentasi produk hukum daerah, serta memberikan bantuan hukum kepada pemerintah daerah.

3.2.3 Pengertian Produk Hukum Daerah

Produk hukum daerah ada segala bentuk peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun jenis-jenis produk hukum daerah : Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan Surat Edaran.

3.2.4 Teori Administrasi Publik

Menurut Dwight Waldo (1989) administrasi public merupakan proses yang menyangkut pelaksanaan kebijakan negara oleh aparatur pemerintah. Dalam hal ini Bagian Hukum sebagai perangkat daerah berfungsi untuk mengimplementasikan kebijakan melalui instrument hukum yang tertib, terstruktur, dan dapat dipertanggung jawabkan.

3.3 Metode Yang Digunakan

3.3.1 Observasi

Dalam metode observasi, penulis melakukan pengumpulan data dengan mengamati langsung pada objek penelitian yaitu di Bagian Hukum Setda Kota Bandar Lampung.

3.3.2 Wawancara

Metode wawancara dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung dan melakukan proses tanya jawab atau wawancara kepada pejabat struktural serta staf fungsional Bagian Hukum Setda Kota Bandar Lampung untuk membahas tentang usulan yang disarankan oleh penulis.

3.3.3 Studi Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengkaji dokumen -dokumen produk hukum tahun 2024, SOP internal, laporan kinerja dan data pendukung lainnya.

3.4 Rancangan Program

Laporan kerja praktek ini disusun setelah penulis melakukan magang di Bagian Hukum Setda Kota Bandar Lampung yang dimulai pada tanggal 02 Mei sampai 30 Mei 2025 dengan waktu jam kerja hari Senin- Jum'at pukul 07.30 –16.00 Wib dan pada hari Sabtu – Minggu libur. Dimana penulis membuat rancangan program system monitoring dan evaluasi kinerja penyusunan produk hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Bandar Lampung. Berikut adalah rancangan program yang akan dibuat oleh penulis:

1. Input data kinerja, system rancangan peraturan yang disusun, status pembahasan, waktu penyelesaian dan tim mana saja yang terlibat di dalamnya.
2. Indikator evaluasi , system ini mencakup efektivitas waktu, kesesuaian dengan SOP, tingkat revisi dan hasil akhir yang akan digunakan.
3. Dashboard Visualisasi, program grafik mingguan atau bulanan yang menunjukkan progress dan capaian.
4. Laporan otomatis, system laporan berkala yang dapat di cetak langsung dari sistem.
5. Menyediakan arsip digital produk hukum.